

ABSTRAK

Hafifah Shaniah, 1228010085, 2026: “Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Limbangan Timur Kabupaten Garut”

Tingkat kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Limbangan Timur masih belum optimal, ditunjukkan oleh realisasi penerimaan pajak yang hanya mencapai sekitar 45% dari target dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran PBB, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Limbangan Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala desa, bendahara desa, ketua LPM, dan staf LPM. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran PBB di Desa Limbangan Timur telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Faktor komunikasi telah dilakukan melalui berbagai saluran seperti rapat desa dan pertemuan warga, tetapi masih terdapat perbedaan pemahaman di masyarakat. Faktor sumber daya dinilai cukup memadai dari segi jumlah aparatur dan ketersediaan data, meskipun masih terdapat kendala dalam pembaruan data dan keterbatasan fasilitas. Faktor disposisi menunjukkan adanya sikap positif dan komitmen aparat desa dalam mendorong kepatuhan masyarakat. Sementara itu, faktor struktur birokrasi telah didukung oleh prosedur yang jelas dan pembagian tugas yang terstruktur, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembaruan data yang lebih akurat, serta inovasi dalam pelayanan guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan Wajib Pajak